

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim, Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Amran Muslimin. 1986. *Aspek-aspek Hukum Organisasi Daerah*. Alumni, Bandung,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah yang telah direvisi oleh UU No. 2 Tahun 2015*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang;

Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

C. Sumber-sumberLain

Munzil, Fontian. 2012. *Analisis Yuridis Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Media Justitia Nusantara 3(1), Program Pasca Sarjana Univ Islam Nusantara, Bandung.

Raharja, dkk. 2015. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan*, Jurnal Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho.2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di era Otonomi*, Bayumedia Publishing dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi Unibraw, Malang.

Renstra Kota Padang 2018-2019